

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar

Community Empowerment Through Strengthening Social Capital and the Role of Stakeholders in the Development of Tourism Villages in Karanganyar Regency

Agung Wibowo^{*}), Eny Lestari, Sugihardjo

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, 57126. Indonesia.

^{*}E-mail korespondensi: agungwibowo@staff.uns.ac.id

Diterima: 04 Oktober 2023 | Direvisi: 04 Januari 2024 | Disetujui: 22 Januari 2024 | Publikasi Online: 31 Maret 2024

ABSTRAK

Keberadaan nilai-nilai modal sosial dan peran stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat di desa wisata memberikan dampak pada penguatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai modal sosial dan peran *stakeholders* dalam pembangunan desa wisata. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, perangkat desa, petani, kelompok wanita tani, Kelompok usaha ekonomi produktif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai modal sosial di masyarakat (hubungan sosial, nilai/norma, toleransi, kesediaan mendengar, kejujuran, pengetahuan tradisional, jaringan sosial, *trust*, tukar kebaikan, kesetiaan dan kebersamaan, tanggung jawab, partisipasi sosial, dan kemandirian) terbukti berperan penting dalam pembangunan desa wisata. Selanjutnya stakeholder (Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Karang Taruna, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), tokoh masyarakat, Perhutani) memainkan peran penting di dalam pemberdayaan masyarakat, yakni membangun keberlanjutan, melakukan perubahan dan sebagai fasilitator.

Kata kunci : modal sosial, peran stakeholder, pembangunan, desa wisata

ABSTRACT

The existence of the values of social capital and the role of stakeholders in community empowerment in tourist villages has an impact on strengthening the local economy. This study aims to describe the values of social capital, conflict dynamics and the role of stakeholders in the development of tourist villages. The location of this research is in Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. Qualitative method is used and adheres to a phenomenological paradigm. This study uses qualitative research methods using a phenomenon research design, which is an empirical inquiry to capture the meaning of human life experience about a phenomenon. The informants in this research were community leaders, village officials, farmers, women's farming groups, productive economic business groups. Data analysis was carried out using an interactive analysis model, namely through the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the values of social capital in the community (social relations, values/norms, tolerance, ethnicity, willingness to listen, honesty, traditional knowledge, social networks, trust, exchange of kindness, loyalty and togetherness, responsibility, social participation, and independence) have proven to play an important role in the development of tourist villages. Furthermore, stakeholders (Village Government, Universities, Karangtaruna, PKK (Family Welfare Development), community leaders, Perhutani) play an important role in community empowerment, namely building sustainability, making changes and as facilitators.

Keywords : social capital, role of stakeholders, development, tourist villages

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Gugusan pulau dan pegunungan yang sangat indah menjadikan potensi wisata alam di Indonesia sangat besar (Farhan & Anwar, 2016; Satrya, 2022; Wijaya, 2019). Pembangunan desa wisata berbasis wisata alam pada saat ini banyak dikembangkan di seluruh pelosok tanah air Indonesia sejalan dengan adanya dana desa sebagai implementasi Undang-Undang tentang desa. Kabupaten Karanganyar berada di lereng sebelah barat Gunung Lawu memiliki potensi wisata alam sangat besar (hutan, bukit, perkebunan, telaga, air terjun). Penelitian ini dilakukan di berbagai obyek wisata berbasis alam di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam berupa wisata air terjun, spot foto dan swa foto, serta kuliner khas desa. Pembangunan ekowisata ini berkembang pesat sejak lima tahun terakhir. Keberhasilan pembangunan ekowisata terwujud karena kuatnya nilai-nilai modal sosial di masyarakat dan kerjasama yang kuat dari para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam keanggotaan entitas sosial tertentu (Bozionelos, 2015; Min et al., 2008; Saz-Gil et al., 2021). Contohnya pada paguyuban, asosiasi, kelompok arisan, dan lain-lain. Modal sosial menekankan pada hubungan jaringan sosial dan menekankan pada karakteristik yang melekat pada individu yang terlibat dalam interaksi sosial (Corrêa et al., 2021; Han et al., 2020; Hasan et al., 2020; Silva et al., 2020; Straub et al., 2020). Modal sosial sangat diperlukan oleh masyarakat agar terjaga kelangsungan hidupnya dalam menghadapi gelombang yang dahsyat dalam era teknologi informasi (Ali et al., 2022; Carrico et al., 2019; Gilbert et al., 2022). Modal sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat supaya tidak tergantung dan dapat mengelola kepentingannya sendiri (Calderon Gomez, 2021; Hua et al., 2021; Pillai et al., 2021; Reich, 2020). Modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut (Ceci et al., 2020; Han et al., 2020; King et al., 2019; Putro et al., 2022; Rodriguez-Giron & Vanneste, 2019). Menurut (Saharuddin et al., 2020; Wirata et al., 2020; Zugravu-Soilita et al., 2021), modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama dengan *stakeholder* akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Stakeholder mempunyai peran dan kepentingan masing-masing. Peran dan kepentingan tersebut akan mempengaruhi kerjasama dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata, baik dalam wujud visi misi, kebijakan, tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun bentuk kebijakan kelembagaan lainnya (Amoako et al., 2022; Becken & Simmons, 2019; Brandão et al., 2019; Liu et al., 2020; Plichta, 2019). Banyaknya kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat, maka diperlukan kerjasama yang kuat antar stakeholder tersebut (Barrane et al., 2021; Dmytriiev et al., 2021; Pedrini & Ferri, 2019; Roxas et al., 2020; Zhuang et al., 2019). Hubungan kerjasama antar stakeholder ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pengembangan desa wisata (Berliandaldo et al., 2021; Rahu, 2021). Meskipun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder berbeda-beda, tetapi mutlak harus diperhitungkan dalam pengelolaan wisata alam. Pengelolaan wisata alam bertujuan untuk memberikan keuntungan para stakeholder dan nilai kepuasan yang optimal bagi wisatawan (Hadian et al., 2021; Herliana, 2015; Hillary, 2020; Roxas et al., 2020; Setini et al., 2021).

Terdapat tiga aspek pokok sebagai dasar stakeholder dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Govindan et al., 2021; Heras-Saizarbitoria et al., 2022; Li et al., 2020; Raub & Martin-Rios, 2019). Keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Penelitian ini mendeskripsikan lebih jauh bagaimana peran yang dimainkan oleh tiap stakeholder (Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Karang Taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), tokoh masyarakat, Perhutani) dalam pengembangan desa wisata. Peran agen perubahan sangat strategis dalam pembangunan Desa Wisata (Daher, 2019; Hayat et al., 2021; Suradi, 2019).

Menurut Rogers (1995), ada tujuh peran yang dilakukan oleh stakeholder sebagai agen pembaharu, yaitu:

“(1) to develop a need for change on the part of client; (2) to establish an information-exchange relationship; (3) to diagnose problems; (4) to create an intent to change in the client; (5) to translate an intent into action; (6) to stabilize adoption and prevent discontinuance; (7) to achieve a terminal relationship with client.

(1) mengembangkan kebutuhan akan perubahan di pihak klien; (2) menjalin hubungan pertukaran informasi; (3) untuk mendiagnosis masalah; (4) menciptakan niat untuk berubah pada klien; (5) menerjemahkan niat menjadi tindakan; (6) untuk menstabilkan adopsi dan mencegah penghentian; (7) untuk mencapai hubungan terminal dengan klien.

Menurut (Havelock & Zlotolow, 1995), agen perubahan perlu memperhatikan 4 pertimbangan dalam menjalin hubungan dengan klien: (1) sikap bersahabat, seorang agen perubahan adalah seorang “penerobos”. oleh karena itu muncul pertanyaan: “apakah sang agen perubahan ini bermaksud baik atau tidak?; (2) kesamaan, seorang agen perubahan yang efektif adalah seorang yang dirasakan sama dengan kliennya, misalnya dalam hal penampilan sehari-hari, cara berpakaian, gaya bicara dan sebagainya; (3) manfaat, seorang agen perubahan hendaklah menciptakan kesan ditengah kliennya bahwa ia memang seorang yang bermanfaat bagi mereka; dan (4) seorang agen perubahan harus selalu menjadi seorang pendengar yang baik. Untuk itu perlu meminta penjelasan untuk sesuatu yang dirasakan kurang jelas. Keempat hal ini akan menjadi pisau analisis peneliti di dalam melihat bagaimana agen perubahan menjalin hubungan dengan masyarakat dalam pembangunan desa wisata.

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana peran stakeholders di dalam pembangunan desa wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karanganyar, dasar pertimbangan pemilihan wilayah ini adalah bahwa wilayah tersebut berkembang ekowisata yang paling banyak di provinsi Jawa Tengah. Hal yang sangat menarik wilayah ini dijadikan sebagai obyek wisata adalah potensi keindahan alam di sekitar dan adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar yang berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Di samping itu, peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan pada masyarakat di sekitar desa wisata sehingga bisa dijadikan sebagai pijakan untuk menangkap informasi nilai-nilai modal sosial yang tercermin dalam keseharian masyarakat di wilayah setempat, mendeskripsikan keberhasilan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata sehingga menjadi bahan pelajaran yang sangat penting untuk dalam pembangunan ekowisata di wilayah lain yang memiliki kesamaan karakteristik.

Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai modal sosial di masyarakat dan peran stakeholder dalam pembangunan desa wisata. Pendekatan fenomenologi dipakai untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala dan mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia sebagai aktor dalam pembangunan desa wisata atau ekowisata (Conklin, 2007; Dangal & Joshi, 2020; Qutoshi, 2018; Rasid et al., 2021; Umanailo, 2019). Pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau *interpretatif* dalam penelitian ini dilakukan untuk menelusuri dan memaknai modal sosial dalam pembangunan desa wisata/ekowisata.

Proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia (Kaushik & Walsh, 2019; Roy & Uekusa, 2020; Strijker et al., 2020). *Case study research "consists of a detailed investigation, often with data collected over a period of time, of phenomena, within their context," with the aim being "to provide an analysis of the context and processes which illuminate the theoretical issues being studied"* Penelitian studi kasus terdiri dari investigasi terperinci, seringkali dengan data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, mengenai fenomena, dalam konteksnya,” dengan tujuan “untuk memberikan analisis konteks dan proses yang menjelaskan permasalahan teoritis yang sedang dipelajari. (Touriki et al., 2022). Cara melakukan wawancara adalah mengikuti saran (Moustakas, 1994) bahwa “*The phenomenological interview involves an informal, interactive process and utilities open-ended comment and questions*”. Wawancara

fenomenologis melibatkan proses informal dan interaktif serta memberikan komentar dan pertanyaan terbuka. Bahkan, (Beck, 2013) lebih tegas mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologis “*a phenomenologist never hypothesizes, but carefully examines actual lived experience to see what it looks like*”. Seorang ahli fenomenologi tidak pernah berhipotesis, namun dengan hati-hati memeriksa pengalaman hidup yang sebenarnya untuk melihat seperti apa pengalaman itu. Penentuan informan penelitian ini disesuaikan dengan kapabilitas orang yang akan diwawancarai untuk dapat mengartikulasikan pengalaman hidupnya.

Dalam penelitian studi kasus ini, di dalam mengumpulkan data meliputi berbagai sumber informasi (observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion*, materi audio visual, dokumen, dan laporan). Wawancara dilakukan dengan pengelola desa wisata, perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok wanita tani, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata dengan melibatkan beberapa mahasiswa di lapangan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, yang dimana selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Allan, 2020; Bogdan & Biklen, 1997; Umanailo, 2019; Wolf, 2012). Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Lacey & Luff, 2001; Owen, 2014; Ruona, 2005). Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2018), yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dapat menjelaskan secara jelas dan padat terkait pilihan paradigma, metode (teknik pengumpulan dan analisis data), *logical framework*, lokasi, unit analisis, dan waktu pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, mayoritas masyarakat yang ada di sekitar objek wisata masih melestarikan ritual turun temurun untuk membangun solidaritas sosial di masyarakat. Ritual tersebut dikenal dengan nama “Dawuhan”. “Dawuhan” merupakan ritual yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada bumi atas pemberian air yang melimpah. Ritual tersebut dilakukan dengan membawa “sesajen” dan menyembelih kambing di sumber mata air setiap satu tahun sekali. Selain untuk melestarikan kebudayaan, ritual ini juga dapat membangun modal sosial di masyarakat. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada, seperti kesadaran untuk menjaga “punden” (sumber mata air) serta menjaga situs daerah yaitu “watu boning”. Hal ini dilakukan untuk menghormati leluhur dan sebagai wujud syukur kepada alam sekaligus menjaga alam. Masyarakat juga sudah bersepakat untuk selalu mengalirkan air dari punden agar seluruh masyarakat sekitar dapat memanfaatkan air tersebut untuk kegiatan sehari-hari.

Masyarakat di sekitar objek wisata membangun modal sosial melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti, pertemuan karang taruna, PKK, arisan dan lainnya yang rutin dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Penelitian lain menyatakan bahwa membangun nilai-nilai modal sosial di masyarakat sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan desa wisata (Nugraha, 2021; Puspitaningrum & Lubis, 2018; Utami, 2019). Hubungan kerjasama yang baik dapat terbangun apabila masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain (Haris, 2014; Syahra, 2003). Di wilayah penelitian terlihat bahwa ada pembagian kerja dalam melakukan suatu kegiatan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaannya. Pembagian kerja dalam kegiatan kerja bakti biasanya adalah laki-laki berperan untuk melaksanakan kegiatan fisik yang lebih berat seperti pemugaran gapura, pembersihan selokan, dan lain sebagainya. Perempuan ditugaskan pada kegiatan fisik yang lebih ringan, seperti menyapu jalan desa, membersihkan pekarangan, dan memasak untuk makan siang. Para masyarakat bersepakat apabila ada yang tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut harus membayar denda sebesar Rp 5.000,00. Uang denda tersebut dimasukkan ke dalam kas kegiatan.

Masyarakat di sekitar objek wisata masih banyak yang mempercayai adanya mitos yang berkembang. Objek wisata air terjun Jumog memiliki jembatan yang bernama “Sambung Roso”. Mitosnya jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antar dua desa yang tak kasat mata. Masyarakat percaya apabila ada pasangan yang menyeberangi jembatan tersebut bersama-sama, kisah cintanya akan berlangsung lama. Mitos lainnya mengenai air terjun Jumok yaitu airnya yang dapat menyembuhkan

penyakit. Masyarakat percaya apabila membasuh tubuh menggunakan air dari air terjun tersebut penyakit yang diderita akan sembuh.

Namun demikian dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari mudahnya nilai-nilai modal sosial di masyarakat, antara lain semakin banyak pemuda yang menarik diri dari masyarakat serta memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kegiatan yang ada di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi yang tidak dapat dikesampingkan. Adanya paham baru yang masuk ke masyarakat juga membuat lunturnya nilai kebudayaan yang ada dan menyebabkan kegiatan untuk mempertahankan modal sosial menjadi berkurang. Selanjutnya nilai-nilai modal sosial pada masyarakat memberikan kontribusi pada efektivitas implementasi program-program pembangunan ekowisata.

Hubungan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, hubungan sosial masyarakat di sekitar objek wisata masih terjalin erat. Hubungan sosial dilakukan untuk membangun rasa kepercayaan dan kebersamaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, pertemuan anggota karang taruna, pertemuan RT/RW, rawang hajatan, dan *tilik tonggo* (menjenguk tetangga yang sakit atau terkena musibah). Dengan memiliki hubungan baik, masyarakat berharap tidak dikucilkan, dan ketika mengalami kesulitan mendapatkan bantuan. Masalah yang dihadapi masyarakat dalam menjadi hubungan sosial adalah pengorbanan waktu, tenaga dan materi. Sebagai contoh pengorbanan waktu dan tenaga, ketika ada pesta pernikahan masyarakat melakukan rawang bisa sampai satu minggu. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan dan kegiatan lain yang harus dilakukan terbengkalai. Pengorbanan materi melalui sumbangan, uang kas, dan pengeluaran lain dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hubungan sosial tersebut terlihat pada: kerjasama yang kuat antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal; Jalinan kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai keberlanjutan dan pengembangan desa wisata yang seimbang; Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan obyek wisata; Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi bagian dari industri pariwisata dengan memberikan pelatihan dan peluang pekerjaan; Adanya kesempatan bisnis kepada masyarakat setempat, seperti *homestay*, warung makan, dan usaha kerajinan lokal.

Makna Nilai (Norma)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, nilai/norma dipahami sebagai suatu hal yang harus dipatuhi dalam bermasyarakat. Masyarakat di sekitar objek wisata mematuhi nilai/norma yang berlaku untuk menghormati adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat dari zaman nenek moyang. Norma/nilai-nilai yang diterapkan masyarakat di sekitar objek wisata meliputi: Melestarikan dan menghormati tradisi-tradisi lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi; Mengikuti ritual dan upacara adat dengan penuh penghargaan; Adanya nilai-nilai budaya dan kebiasaan diwariskan kepada generasi berikutnya; Masyarakat menghormati satu sama lain, termasuk pengunjung wisata, dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal; Membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan dengan pengunjung; Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk tujuan bersama, termasuk kegiatan terkait dengan objek wisata; Masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar objek wisata; Masyarakat mematuhi aturan dan norma terkait dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan. Apabila masyarakat tidak tunduk dan patuh pada nilai/norma yang ada dikhawatirkan akan terjadi adalah ketidakharmonisan (masyarakat akan sesuka hati mengabaikan kepentingan bersama untuk kebaikan bersama dan mendahulukan kepentingannya pribadi). Kendala dalam menerapkan nilai/norma adalah generasi muda banyak yang mulai meninggalkan nilai-nilai Jawa. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kepada keturunannya sejak kecil.

Makna Toleransi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, toleransi dipahami masyarakat sebagai penerimaan terhadap perbedaan. Toleransi dilakukan dengan menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakang, budaya, agama maupun kepercayaannya. Dengan adanya toleransi dalam bermasyarakat diharapkan dapat memperkuat jalinan persaudaraan, menghindari konflik yang menyebabkan perpecahan serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan tentram. Salah satu cara masyarakat mengimplementasikan toleransi di kehidupan sosial yaitu melalui Forum Paguyuban Keberagaman Umat Indonesia (PKUI). Forum PKUI adalah forum antar umat beragama sebagai wadah bertukar

pendapat dari segala isu yang sedang berkembang di masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya bertoleransi yaitu terdapat masyarakat yang tidak menerima kepercayaan lain sehingga tidak menghormati segala kegiatan keagamaan, adat dan budaya selain kepercayaannya. Contoh konflik yang pernah terjadi diantaranya selisih tata cara sholat di salah satu masjid yang menyebabkan jamaah masjid terbagi menjadi dua dan akhirnya mendirikan masjid baru. Selain itu terdapat beberapa organisasi keagamaan yang menentang kegiatan atau budaya *kejawan* dengan alasan hal tersebut syirik dan tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Masyarakat menyikapi kendala-kendala dalam bertoleransi dengan bijak, dan tokoh masyarakat yang menjadi penengah dalam proses mediasi.

Makna Kesediaan Mendengar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, masyarakat di sekitar objek wisata terbiasa saling berkeluh kesah mengenai permasalahan di kehidupan sehari-hari, ekonomi, keagamaan, dan topik yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Keluhan ditanggapi dengan nasehat hanya apabila diminta untuk memberikan saran, jika tidak masyarakat hanya mendengarkan tanpa memberikan saran. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan dicap lancang jika memberikan saran tanpa diminta. Biasanya nasehat atau saran yang diberikan jarang dilakukan oleh orang tersebut.

Makna Kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, kejujuran dimaknai sebagai bertindak dan berkata sesuai keadaan yang sebenarnya dan apa adanya. Kejujuran pedagang di sekitar Objek Wisata Air Terjun Jumog dapat dilihat dari kebijakan pembayaran sewa ruko dengan sistem bagi hasil per porsi sate, namun dikarenakan banyak pedagang yang tidak jujur dengan jumlah omset hariannya manajemen Jumog akan membuat kebijakan baru yang tidak merugikan pihak manajemen. Masyarakat di sekitar objek wisata menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara mengatakan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dan menentang keras adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran diharapkan dapat menjaga kepercayaan antar masyarakat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sehat. Kendala bagi setiap orang untuk berlaku jujur dalam masyarakat diantaranya terkadang terdapat orang/pihak lain yang tidak sependapat sehingga dapat menyebabkan konflik, dan masyarakat yang tidak memiliki pangkat/kedudukan merasa takut berlaku jujur dan memilih untuk diam apabila hal tersebut menyangkut orang yang berpengaruh atau memiliki pangkat/kedudukan tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan keterbukaan semua pihak dalam masyarakat, dibentuk forum diskusi agar masyarakat mau menyampaikan pendapatnya dan dibutuhkan adanya tokoh masyarakat yang berani dalam menyampaikan pendapat untuk melawan tindakan KKN.

Makna Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pengetahuan tradisional untuk memelihara kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata dikenalkan atau diajarkan kepada generasi selanjutnya melalui penyampaian lisan dan mengikutsertakan anak dan cucu di setiap kegiatan atau ritual. Ritual yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah Dawuhan, Dawuhan adalah ritual dengan membawa sesajen dan memotong kambing di sumber mata air. Hal tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada alam semesta karena telah menyediakan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan hidup masyarakat, dengan melakukan ritual tersebut masyarakat percaya bahwa bumi akan selalu menyediakan sumber daya alam yang melimpah untuk hidupnya dan terhindar dari petaka maupun bencana alam.

Makna Jaringan Sosial/Kepemimpinan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pemimpin lokal memiliki peranan masing-masing dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Sesebuah desa memiliki peran sebagai sumber ilmu tradisional yang ada secara turun temurun, perangkat desa sebagai administrasi dan pemangku kebijakan desa yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat, pemuka agama sebagai sumber ilmu agama dan kerohanian, ketua RT/RW sebagai penengah apabila terdapat konflik dan sebagai koordinator kegiatan masyarakat. Menurut masyarakat perangkat desa saat ini banyak yang berumur muda dan kurang berpengalaman, sehingga sulit untuk bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat. Masyarakat merasa kurang menghormati dengan perangkat desa sering tidak hadir jika

diundang pada kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat mematuhi segala hal yang disarankan oleh pemimpinnya karena merasa kurang dalam ilmu dan pengetahuan, sehingga mematuhi seseorang yang dianggap lebih berpengalaman dibidangnya (pemimpin). Masyarakat percaya dengan mematuhi saran pemimpin akan terhindar dari suatu masalah baik yang sudah maupun berkemungkinan akan terjadi. Upaya pemimpin dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat terkendala oleh pihak-pihak/masyarakat yang berbeda pendapat, jika saran atau kebijakan dilaksanakan maka akan menimbulkan konflik, sehingga untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat pemimpin harus mendengarkan pendapat semua pihak dan mencari jalan tengah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pendekatan kepada masyarakat biasanya dilakukan oleh masing-masing ketua RT.

Trust

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, rasa percaya itu akan tumbuh apabila masyarakat sudah mengenal individu tersebut. Perlu adanya proses untuk mengenal atau pendekatan dalam beberapa waktu agar dapat percaya satu sama lain. Kepercayaan tersebut biasanya hadir ketika memiliki pengalaman yang sama, hidup di daerah yang sama, nasib yang sama, dan lain sebagainya. Perbedaan sifat yang dimiliki oleh masing-masing individu masyarakat menjadi hal yang mempengaruhi lamanya proses pendekatan yang terjadi. Tidak semua tetangga memiliki sifat yang baik, namun hal ini tergantung pada cara menyikapinya. Masyarakat berharap dengan berbuat baik kepada orang lain, kebaikan-kebaikan tersebut juga akan kembali kepada dirinya. Rasa percaya masyarakat dengan para pemimpin serta tokoh masyarakat muncul karena masyarakat meyakini pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki para pemimpin serta tokoh masyarakat lebih banyak dan lebih luas. Kepercayaan yang telah dibangun antara dua individu akan hilang ketika ada masalah yang terjadi atau ditipu oleh salah satu pihak.

Tukar kebaikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, perlu adanya hubungan timbal balik antar individu masyarakat karena nantinya kita pasti akan membutuhkan orang lain dalam keadaan apapun. Banyak bentuk hubungan timbal balik atau biasa disebut dengan tukar kebaikan yang terjadi di masyarakat sekitar objek wisata. Dengan membantu tetangga yang sedang membuat acara seperti pernikahan, syukuran, atau ketika sedang tertimpa musibah. Memberikan oleh-oleh ketika pulang dari luar kota atau memberikan hasil panen kepada tetangga juga merupakan tukar kebaikan yang terjadi di masyarakat sekitar objek wisata. Harapannya dengan tukar kebaikan, rasa kekeluargaan yang ada di masyarakat akan semakin kuat dan kebaikan yang diberikan akan kembali lagi kepada dirinya. Tukar kebaikan yang terjadi di masyarakat dapat hilang apabila terjadi konflik antar individu maupun antar kelompok masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan untuk saling tukar kebaikan juga cenderung memiliki sifat individualis.

Kesetiaan dan kebersamaan

Nilai kebersamaan merupakan nilai yang sudah disepakati dan menjadi dasar atas terciptanya solidaritas sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, adanya berbagai kegiatan sosial yang sering dilaksanakan bersama-sama membuat rasa kebersamaan antar masyarakat semakin kuat. Rasa kesetiaan yang dimiliki juga lama-lama dapat terbentuk. Faktor yang menjadi pendorong seseorang memiliki rasa kebersamaan dan kesetiaan adalah adanya rasa kekeluargaan serta hubungan yang erat antar individu masyarakat. Lingkungan masyarakat juga akan menjadi lebih harmonis ketika masing-masing individu telah memiliki rasa saling menjaga dan setia satu sama lain. Seseorang yang enggan untuk bersosialisasi dengan tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat seperti kerja bakti, maka akan dikenakan sanksi sosial. Orang tersebut akan dikucilkan dan masyarakat akan sulit untuk percaya dengannya. Hal yang dapat memudahkan atau bahkan menghilangkan rasa kesetiaan dan kebersamaan yang ada di masyarakat yaitu timbulnya kesalahpahaman atau adanya masalah yang menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah.

Tanggungjawab sosial

Komitmen berhubungan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama oleh sekelompok orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, komitmen yang ada di lingkungan masyarakat sekitar objek wisata adalah komitmen untuk menjaga situs budaya yang berupa “*punden*” dan juga komitmen untuk tetap mewarisi tradisi Jawa. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila

tidak memiliki komitmen untuk menjaga situs budaya untuk berbakti dan mengingat leluhur, maka orang tersebut akan terkena bala atau musibah. Masyarakat yang tidak mewarisi atau menjaga tradisi Jawa lambat laun akan kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Komitmen-komitmen tersebut dapat hilang apabila masyarakat lebih percaya kepada paham-paham baru yang masuk dalam lingkungan masyarakat.

Partisipasi sosial masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, terdapat berbagai kegiatan yang memerlukan partisipasi dari masyarakat. Bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat antara lain dengan ikut menjadi anggota dalam suatu organisasi masyarakat yang ada, atau bahkan menjadi pengurus dari organisasi tersebut. Biasanya wanita yang sudah memiliki anak mengikuti organisasi PKK. Masyarakat yang sudah berkomitmen untuk menjadi anggota dari suatu organisasi harus dan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilaksanakan. Apabila seseorang tidak dapat hadir, maka akan dikenakan sanksi seperti denda. Besarnya denda disesuaikan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Urusan pribadi yang terkadang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan kemasyarakatan membuat masyarakat sulit untuk membagi waktu dan tak jarang pula tidak bisa berpartisipasi pada kegiatan tersebut.

Kemandirian

Seseorang dapat dikatakan mandiri ketika sudah tidak mengandalkan orang lain dalam berbagai hal dan juga kita bisa diandalkan oleh orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, kebanyakan masyarakat di sekitar objek wisata sudah memiliki pekerjaan sendiri. Para pemudanya juga sudah memiliki pekerjaan dan kebanyakan membuka usaha sendiri. Salah satu contoh dari bentuk kemandirian yang diciptakan di lingkungan masyarakat sekitar objek wisata adalah para pemuda yang berinisiatif untuk membuka wahana wisata tubing dan *jeep*. Wahana tersebut sangat digemari oleh para pengunjung karena dengan menggunakan *jeep*, pengunjung dapat mengelilingi tempat wisata tersebut dengan mudah dan menyenangkan. Apabila seseorang tidak memiliki kemandirian, orang tersebut akan selalu bergantung kepada orang lain dan sulit menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang yang memiliki kemandirian akan cenderung tidak banyak bergantung kepada orang lain serta dapat menghadapi masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut sendiri. Kemandirian itu akan hilang ketika adanya krisis yang terjadi, sehingga masyarakat akan mencari atau membutuhkan bantuan orang lain.

Peran Stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Wisata

Peran Stakeholder dalam membangun keberlanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengacu pada potensi sumber-sumber alam dan lingkungan maupun sumber daya manusia secara optimal di satu pihak dan di pihak lain memelihara keseimbangan optimal antara berbagai tuntutan dan ancaman terhadap sumber-sumber daya tersebut. Tabel 1 (pada halaman 157) memperlihatkan aktivitas *stakeholder* di dalam membangun keberlanjutan yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan harus mendasari pengembangan desa wisata. Terdapat dua hal yang dipertimbangkan, yaitu daya dukung potensi sumber-sumber daya alam dan lingkungan tersebut dan solidaritas transgenerasi. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam, tetapi juga pada kehidupan sosial-budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata berkelanjutan secara sederhana dapat dilihat melalui tiga konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan lingkungan, dan berkelanjutan sosial-budaya. Keberlanjutan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral. Keberlanjutan lingkungan diharapkan mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Keberlanjutan sosial-budaya diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Pemodelan desa wisata bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan harus terus secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas yang baru bagi desa untuk memenuhi tujuan pemecahan masalah yang dihadapi oleh desa tersebut.

Tabel 1. Aktivitas stakeholder dalam membangun keberlanjutan

Aspek Keberlanjutan	Indikator Kinerja	Pelaku Stakeholder	Aktivitas Stakeholder
Keberlanjutan ekonomi	Memelihara keberlanjutan pemerintahan dalam membangun ekonomi lokal	Pemerintah Desa	Memfasilitasi kegiatan pengembangan desa wisata dan penyedia lahan untuk kegiatan ekonomi
		Perguruan Tinggi	Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar
		Karang Taruna	Sebagai pelaku utama kegiatan pengembangan desa wisata
		PKK	Melakukan pengolahan dan pemasaran produk unggulan desa wisata
Keberlanjutan sosial-budaya	Mencapai kesetaraan	Tokoh Masyarakat	Sebagai mediator antar <i>stakeholder</i>
		Perguruan Tinggi	Melakukan penyuluhan mengenai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan
		PKK	Melakukan pertunjukan tradisional unggulan desa kepada pengunjung
Keberlanjutan lingkungan	Memelihara sumber daya yang stabil	Pemerintah Desa, PKK Karang Taruna	Melakukan pemilahan, pengolahan, dan penggunaan kembali sampah organik maupun anorganik
		Perguruan Tinggi	Melakukan penyuluhan pemilahan, pengolahan, dan penggunaan kembali sampah organik maupun anorganik
	Menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan	Perhutani	Melakukan kegiatan penghijauan hutan, penyediaan bibit tanaman, dan membuat kebijakan mengenai pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan Desa Wisata
		Pemerintah Desa	Membuat kebijakan desa dan mendukung kebijakan Perhutani mengenai pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan desa wisata
		Perguruan Tinggi	Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat terkait keberlanjutan lingkungan

Sumber Data: Analisis Hasil Wawancara dan FGD

Peran Stakeholder dalam melakukan perubahan

Perubahan sosial biasa dikatakan sebagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala umum yang berlaku dimanapun selama hidup manusia. Masyarakat sendiri selalu mengalami perubahan walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada taraf perubahan yang besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar bagi aktivitas perilaku manusia. Tabel 2 (pada halaman 158) memperlihatkan hasil analisis berdasar perubahan yang digagas oleh Lippi (2018).

Peran Stakeholder sebagai fasilitator

Fasilitator adalah orang yang bertugas membantu, memudahkan atau membimbing anggota kelompok atau masyarakat yang dibinanya dan dengan demikian mereka merasa terayomi dan terdorong untuk berpartisipasi. Sebagai agen pembaharu, maka tugas sebagai fasilitator dalam pengembangan desa wisata bertujuan: (1) agar inovasi dalam pengembangan wisata mudah dan cepat diterima dan diterapkan masyarakat; (2) agar masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan pertanian konservasi dapat dibantu pemecahan dan jalan keluarnya, dan (3) meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan agen pembaharu sebagai fasilitator dalam pengembangan desa wisata disajikan dalam Tabel 3 (pada halaman 159).

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan stakeholder sebagai fasilitator dalam memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. *Pertama*, persiapan. Stakeholder melakukan diidentifikasi: (a) potensi yang ada di masyarakat, peran penting bagi *stakeholder* adalah mengidentifikasi dan menemukan sumber-sumber daya dan potensi serta membantu masyarakat melihat bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan, (b) kelemahan-kelemahan yang ada, (c) kesempatan yang masih terbuka, (d) hambatan yang mungkin terjadi; dan (e) tokoh-tokoh yang berperan. *Kedua*, pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi berbentuk berbagai program sesuai dengan yang telah direncanakan. *Ketiga*, monitoring dan evaluasi. Apakah berjalan lancar atau mengalami hambatan; Pada tahap ketiga ini belum banyak dilakukan oleh

stakeholder yang ada (penyuluh, perguruan tinggi, kelompok tani, tokoh masyarakat maupun pemerintah daerah). Peran *stakeholder* sebagai fasilitator juga ditunjukkan dalam membangun semangat sosial, yaitu kemampuan menginspirasi, mengantisipasi, mengaktivasi, menstimulasi, menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan.

Tabel 2. Aktivitas Stakeholder dalam melakukan perubahan

Tahapan Perubahan/ Indikator Kinerja	Pelaku Stakeholder	Aktivitas Stakeholder
Tahap 1. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah		
Mengemukakan alternatif-alternatif baru untuk mengatasi problem yang ada,	Karang Taruna	Memberikan ide inovasi mengenai pengemabangan potensi desa wisata
	Perguruan Tinggi	Mensosialisasikan potensi desa dan melakukan pelatihan-pelatihan dalam pengembangannya
Membantu timbulnya kebutuhan dengan cara konsultatif dan persuasif.	Pemerintah Desa	Pemerintah desa menjalin dialog dan pertemuan pertemuan baik formal maupun non formal untuk membangun kesadaran di dalam melakukan perubahan
	Karang Taruna	Membangun komunikasi dan mengakses informasi dengan stakeholder untuk memfasilitasi masyarakat dalam membangkitkan melakukan perubahan
	Perguruan Tinggi	Perguruan tinggi membuka diri dan menerima konsultasi di dalam pengembangan desa wisata
Tahap 2. Mengadakan hubungan untuk berubah		
Membina keakraban dengan kliennya	Pemerintah Desa	Melakukan kunjungan dan menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh pengelola desa wisata
Klien menerima agen pembaru secara fisik dan sosial sebelum mereka diminta menerima inovasi yang dipromosikan.	Karang Taruna	Membangun semangat kegotong-royongan dan kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan desa wisata
Tahap 3. Mendiagnosis masalah		
Menganalisa situasi problematis kliennya untuk menentukan mengapa cara yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka.	Karang Taruna	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pengembangan desa wisata
Terjun ke dalam situasi kliennya agar dapat melihat dunia klien menurut pandangan klien itu sendiri.	Pemerintah Desa	Pemerintah desa dan ketua karang taruna melakukan koordinasi dengan pengelola desa wisata dalam memantau pengembangannya
Tahap 4. Mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien		
Membangkitkan motivasi untuk mengadakan perubahan	Perguruan Tinggi	Penyelenggaraan KKN tematik integratif untuk memotivasi masyarakat dalam pengembangandes wisata
Menimbulkan dorongan untuk menerima/menaruh minat inovasi.	Karang Taruna	Fasilitasi jalinan kerja sama dengan stakeholder di luar wilayah nya di dalam melakukan transfer teknologi.
Tahap 5. Merencanakan tindakan pembaharuan		
Mempromosikan pelaksanaan program pembaruan yang disarankan	Pemerintah Desa	Memasukkan di dalam program pembangunan desa untuk dijadikan sebagai program kerja
	Perguruan Tinggi	Mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat untuk dipamerkan di kegiatan-kegiatan kampus maupun pada kegiatan lainnya
Tahap 6. Memelihara program pembaharuan dan mencegahnya dari kemandegan		
Menjaga penerimaan ide baru itu secara efektif dengan memberikan informasi atau pesan-pesan yang menunjang	Karang Taruna	Bekerja sama dengan stakeholder untuk membuka akses informasi
	Perguruan Tinggi	Menjadikan wilayah tersebut sebagai mitra di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen serta wilayah KKN oleh mahasiswa
Tahap 7. Mencapai hubungan terminal		
Mengembangkan kemampuan kliennya untuk menjadikan dirinya sebagai agen pembaru (setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri),	Pemerintah Daerah	Memunculkan kader-kader penggerak pembangunan dengan memfasilitasi pengembangan kapasitas kelompok tani melalui pelatihan-pelatihan, magang, pameran dan mengikutkan dalam kegiatan lomba-lomba.

Sumber Data: Analisis Hasil Wawancara dan FGD

Tabel 3. Aktivitas Stakeholder dan perannya sebagai fasilitator

Kategori Aktivitas	Pelaku Stakeholder	Aktivitas yang dilakukan dan Kepentingannya
Latihan keterampilan	Pemerintah Desa	Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Perguruan Tinggi	Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengembangan desa wisata agar tercipta diseminasi inovasi
	Karang Taruna	Memfasilitasi pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan wisata kepentingannya agar tercipta kemandirian lokal
Mendorong masyarakat untuk menyadari akan kepentingan dengan dibentuknya wadah;	Pemerintah Desa	Memfasilitasi dibentuknya BUMDes dan PokDarWis
Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi;	Karang Taruna	Menyelenggarakan pertemuan rutin setiap bulan sekali untuk membahas permasalahan pengembangan desa wisata dan masalah-masalah yang dihadapi warga
	Pemerintah Desa	Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang beberapa tenaga ahli di bidangnya untuk sharing informasi
Membantu menumbuhkan percaya diri	Perguruan Tinggi	Memfasilitasi pentas budaya lokal yang mampu membangun spirit untuk konservasi lingkungan agar dikenal luas
	Pemerintah Desa	Memfasilitasi ajang kreativitas budaya lokal untuk bisa perform dan bisa dilestarikan
Membantu untuk memecahkan masalah;	Perguruan Tinggi	Menjadikan wilayah tersebut sebagai mitra di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen ataupun KKN oleh mahasiswa
	Karang Taruna	Memfasilitasi dialog untuk mencari jalan keluar bila ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu dalam pengembangan desa wisata.
Mengintegrasikan masalah-masalah dalam program-program.	Pemerintah Desa	Memfasilitasi dalam penyusunan program pengembangan desa wisata
	Karang Taruna	Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan modal pengembangan ekonomi

Sumber Data: Analisis Hasil Wawancara dan FGD

Hasil penelitian menguatkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana individu dan kelompok masyarakat diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada (Barrane et al., 2021; Dmytriye et al., 2021; Jamal & Dredge, 2014; Pedrini & Ferri, 2019; Roxas et al., 2020; Tolkach & King, 2015). Stakeholder, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, maupun lembaga pendidikan, memiliki peran penting sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial, norma, kepercayaan, dan saling ketergantungan yang ada di dalam masyarakat.

Salah satu peran utama stakeholder adalah memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan masyarakat. Stakeholder harus menciptakan ruang dan mekanisme yang inklusif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum dialog, pertemuan partisipatif, atau lembaga adat yang ada (Brandão et al., 2019; Plichta, 2019; Snis et al., 2021). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka secara langsung, sehingga mereka merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder memiliki peran dalam membangun jaringan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat modal sosial. Stakeholder dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara berbagai pihak, sehingga terjadi kolaborasi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aman et al., 2022; Berliandaldo et al., 2021), bahwa dengan membangun kerjasama yang kuat, stakeholder dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, peluang, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Stakeholder juga berperan dalam memberikan akses dan mendukung pengembangan sumber daya manusia masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan keterampilan. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, stakeholder membantu masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dalam konteks ini, stakeholder

dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, serta menyediakan akses ke program-program pendidikan formal dan non-formal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Masyarakat di sekitar objek wisata membangun modal sosial melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti, pertemuan karang taruna, PKK, arisan dan lainnya yang rutin dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Peran Stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar desa wisata, meliputi peran stakeholder dalam membangun keberlanjutan, melakukan perubahan dan memainkan peran sebagai fasilitator. Keberlanjutan tersebut meliputi keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya dalam tahapan melakukan perubahan meliputi tujuh tahap, yakni (1) membangkitkan kebutuhan untuk berubah; (2) mengadakan hubungan untuk berubah; (3) mendiagnosis masalah; (4) mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien; (5) merencanakan tindakan pembaharuan; (6) memelihara program pembaharuan dan mencegahnya dari kemandegan dan (7) mencapai hubungan terminal. Langkah-langkah yang dilakukan stakeholder sebagai fasilitator dalam memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah tersebut meliputi: Mengemukakan alternatif-alternatif baru untuk mengatasi problem yang ada; Membantu timbulnya kebutuhan dengan cara konsultatif dan persuasive; Membina keakraban dengan kliennya, klien menerima agen pembaru secara fisik dan sosial sebelum mereka diminta menerima inovasi yang dipromosikan; Menganalisa situasi problematis kliennya untuk menentukan mengapa cara yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka; Terjun ke dalam situasi kliennya agar dapat melihat dunia klien menurut pandangan klien itu sendiri; Membangkitkan motivasi untuk mengadakan perubahan; Menimbulkan dorongan untuk menerima/menaruh minat inovasi; Mempromosikan pelaksanaan program pembaruan yang disarankan; Menjaga penerimaan ide baru itu secara efektif dengan memberikan informasi atau pesan-pesan yang menunjang; Mengembangkan kemampuan kliennya untuk menjadikan dirinya sebagai agen pembaru (setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Universitas Sebelas Maret atas pendanaan melalui kompetisi Hibah Penelitian Fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. H., Fallah, M. P., McCarthy, J. M., Keil, R., & Connolly, C. (2022). Mobilizing the social infrastructure of informal settlements in infectious disease response—The case of Ebola Virus Disease in West Africa. *Landscape and Urban Planning, 217*, 104256.
- Allan, G. (2020). Qualitative research. In *Handbook for research students in the social sciences* (pp. 177–189). Routledge.
- Aman, J., Abbas, J., Shi, G., Ain, N. U., & Gu, L. (2022). Community wellbeing under China-Pakistan economic corridor: role of social, economic, cultural, and educational factors in improving residents' quality of life. *Frontiers in Psychology, 12*, 816592.
- Amoako, G. K., Obuobisa-Darko, T., & Ohene Marfo, S. (2022). Stakeholder role in tourism sustainability: The case of Kwame Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana. *International Hospitality Review, 36*(1), 25–44.
- Barrane, F. Z., Ndubisi, N. O., Kamble, S., Karuranga, G. E., & Poulin, D. (2021). Building trust in multi-stakeholder collaborations for new product development in the digital transformation era. *Benchmarking: An International Journal, 28*(1), 205–228.
- Beck, C. T. (2013). Descriptive phenomenology. In *Routledge international handbook of qualitative nursing research* (pp. 163–174). Routledge.

- Becken, S., & Simmons, D. G. (2019). 16. Stakeholder management: different interests and different actions. In *Overtourism* (pp. 234–249). De Gruyter Oldenbourg.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Allyn & Bacon Boston, MA.
- Bozionelos, N. (2015). Social capital and careers: Indisputable evidence and note for caution. *Handbook of Research on Sustainable Careers*, 67–82.
- Brandão, F., Breda, Z., & Costa, C. (2019). Innovation and internationalization as development strategies for coastal tourism destinations: The role of organizational networks. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 41, 219–230.
- Calderon Gomez, D. (2021). The third digital divide and Bourdieu: Bidirectional conversion of economic, cultural, and social capital to (and from) digital capital among young people in Madrid. *New Media & Society*, 23(9), 2534–2553.
- Carrico, A. R., Truelove, H. B., & Williams, N. E. (2019). Social capital and resilience to drought among smallholding farmers in Sri Lanka. *Climatic Change*, 155, 195–213.
- Ceci, F., Masciarelli, F., & Poledrini, S. (2020). How social capital affects innovation in a cultural network: Exploring the role of bonding and bridging social capital. *European Journal of Innovation Management*, 23(5), 895–918. <https://doi.org/10.1108/EJIM-06-2018-0114>
- Conklin, T. A. (2007). Method or madness: Phenomenology as knowledge creator. *Journal of Management Inquiry*, 16(3), 275–287.
- Corrêa, V. S., Queiroz, M. M., & Shigaki, H. B. (2021). Social capital and individual entrepreneurial orientation: innovativeness, proactivity, and risk-taking in an emerging economy. *Benchmarking: An International Journal*.
- Daher, I. S. (2019). Peran Agen Perubahan Sebagai Pelaku Pembangunan dalam Pengembangan Kelompok Sosial di Wisata Desa Sidoluhur. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(1), 8–13.
- Dangal, M., & Joshi, R. (2020). Hermeneutic phenomenology: Essence in educational research. *Open Journal for Studies in Philosophy*, 4(1).
- Dmytriiev, S. D., Freeman, R. E., & Hörisch, J. (2021). The relationship between stakeholder theory and corporate social responsibility: Differences, similarities, and implications for social issues in management. *Journal of Management Studies*, 58(6), 1441–1470.
- Farhan, H., & Anwar, K. (2016). The tourism development strategy based on rural and local wisdom. *Journal of Sustainable Development*, 9(3), 170–181.
- Gilbert, K. L., Ransome, Y., Dean, L. T., DeCaille, J., & Kawachi, I. (2022). Social capital, Black social mobility, and health disparities. *Annual Review of Public Health*, 43, 173–191.
- Govindan, K., Shaw, M., & Majumdar, A. (2021). Social sustainability tensions in multi-tier supply chain: A systematic literature review towards conceptual framework development. *Journal of Cleaner Production*, 279, 123075.
- Hadian, M. S. D., Suganda, B. R., Khadijah, U. L. S., & Anwar, R. K. (2021). River development as a sustainable geo-tourism with a participatory stakeholder approach. *Geo Journal of Tourism and Geosites*, 34(1), 155–163.
- Han, S. H., Yoon, S. W., & Chae, C. (2020). Building social capital and learning relationships through knowledge sharing: A social network approach of management students' cases. *Journal of Knowledge Management*, 24(4), 921–939.

- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Hasan, I., He, Q., & Lu, H. (2020). The impact of social capital on economic attitudes and outcomes. *Journal of International Money and Finance*, 108, 102162.
- Havelock, R. G., & Zlotolow, S. (1995). *The change agent's guide*. Educational Technology.
- Hayat, M. A., Sanusi, S., & Khuzaini, K. (2021). Peran agen perubahan dan teknologi informasi komunikasi dalam mengembangkan Desa Lok Baintan melalui eceng gondok menjadi kertas kreasi. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 10(4), 300–306.
- Heras-Saizarbitoria, I., Urbieto, L., & Boiral, O. (2022). Organizations' engagement with sustainable development goals: From cherry-picking to SDG-washing? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(2), 316–328.
- Herliana, E. T. (2015). Preserving Javanese Culture through Retail Activities in Pasar Beringharjo, Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.081>
- Hillary, J. (2020). Factors Affecting Tourists Satisfaction in Candirejo Tourism Village, Indonesia. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 6(2), 315–328.
- Hua, Y., Dong, F., & Goodman, J. (2021). How to leverage the role of social capital in pro-environmental behavior: A case study of residents' express waste recycling behavior in China. *Journal of Cleaner Production*, 280, 124376.
- Jamal, T., & Dredge, D. (2014). Tourism and community development issues. R. Sharpley and D. Telfer, *Tourism and Development. Concepts and Issues, Second Edition*. London: Channel View, 178–204.
- Kaushik, V., & Walsh, C. A. (2019). Pragmatism as a research paradigm and its implications for social work research. *Social Sciences*, 8(9), 255.
- King, B., Fielke, S., Bayne, K., Klerkx, L., & Nettle, R. (2019). Navigating shades of social capital and trust to leverage opportunities for rural innovation. *Journal of Rural Studies*, 68, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.02.003>
- Lacey, A., & Luff, D. (2001). *Qualitative data analysis*. Trent focus Sheffield.
- Li, G., Lim, M. K., & Wang, Z. (2020). Stakeholders, green manufacturing, and practice performance: Empirical evidence from Chinese fashion businesses. *Annals of Operations Research*, 290, 961–982.
- Lippit, V. D. (2018). *Land reform and economic development in China: A study of institutional change and development finance*. Routledge.
- Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. *Journal of Rural Studies*, 79, 177–188.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Min, S., Kim, S. K., & Chen, H. (2008). Developing social identity and social capital for supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 29(1), 283–304.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. Sage publications.
- Nugraha, I. G. P. (2021). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Serangan Denpasar Bali. *Media Wisata*, 19(2), 179–185.
- Owen, G. T. (2014). Qualitative methods in higher education policy analysis: Using interviews and

- document analysis. *The Qualitative Report*, 19(26), 1.
- Pedrini, M., & Ferri, L. M. (2019). Stakeholder management: a systematic literature review. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(1), 44–59.
- Pillai, V., Pandey, M., & Bhatt, B. (2021). Social sustainability at the BOP through building inclusive social capital: a case study of Drishtee. *Sharing Economy at the Base of the Pyramid: Opportunities and Challenges*, 301–318.
- Plichta, J. (2019). The co-management and stakeholders theory as a useful approach to manage the problem of overtourism in historical cities—illustrated with an example of Krakow. *International Journal of Tourism Cities*.
- Puspitaningrum, E., & Lubis, D. P. (2018). Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(4), 465–484.
- Putro, H. P. N., Rusmaniah, R., Mutiani, M., Abbas, E. W., Jumriani, J., & Ilhami, M. R. (2022). Social Capital of Micro, Small and Medium Enterprises in Kampung Purun for Improving Entrepreneurship Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1669–1680.
- Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A philosophy and method of inquiry. *Journal of Education and Educational Development*, 5(1), 215–222.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24.
- Rasid, R., Djafar, H., & Santoso, B. (2021). Alfred Schutz’s Perspective in Phenomenology Approach: Concepts, Characteristics, Methods and Examples. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(1), 190–201.
- Raub, S. P., & Martin-Rios, C. (2019). “Think sustainable, act local”—a stakeholder-filter-model for translating SDGs into sustainability initiatives with local impact. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 31(6), 2428–2447.
- Reich, J. A. (2020). “We are fierce, independent thinkers and intelligent”: Social capital and stigma management among mothers who refuse vaccines. *Social Science & Medicine*, 257, 112015.
- Rodriguez-Giron, S., & Vanneste, D. (2019). Social capital at the tourist destination level: Determining the dimensions to assess and improve collective action in tourism. *Tourist Studies*, 19(1), 23–42.
- Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations: modifications of a model for telecommunications. *Die Diffusion von Innovationen in Der Telekommunikation*, 25–38.
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders’ roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45, 387–398.
- Roy, R., & Uekusa, S. (2020). Collaborative autoethnography: “Self-reflection” as a timely alternative research approach during the global pandemic. *Qualitative Research Journal*, 20(4), 383–392.
- Ruona, W. E. A. (2005). Analyzing qualitative data. *Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry*, 223(263), 233–263.
- Saharuddin, S., Rahman, U., Mahmud, M., & Ondeng, S. (2020). Social Capital Analysis as A Pattern of Developing Islamic Education an An Integral School Lukman Al-Hakim Surabaya. *Didaktika Religia*, 8(1), 197–214.
- Satrya, I. D. G. (2022). Natural tourism development strategy in murung raya regency, central kalimantan. *Tourism and Hospitality International Journal*, 19(1), 77–89.

- Saz-Gil, I., Bretos, I., & Díaz-Foncea, M. (2021). Cooperatives and social capital: A narrative literature review and directions for future research. *Sustainability*, *13*(2), 534.
- Setini, M., Wardana, I., Sukaatmadja, I., Ekawati, N., Yasa, N., & Astawa, I. (2021). Policy models for improving ecotourism performance to build quality tourism experience and sustainable tourism. *Management Science Letters*, *11*(2), 595–608.
- Silva, T. A. de S., Corrêa, V. S., Vale, G. M. V., & Giglio, E. M. (2020). Influence of social capital offline and online on early-stage entrepreneurs. *Revista de Gestão*, *27*(4), 393–408.
- Snis, U. L., Olsson, A. K., & Bernhard, I. (2021). Becoming a smart old town—How to manage stakeholder collaboration and cultural heritage. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, *11*(4), 627–641.
- Straub, A. M., Gray, B. J., Ritchie, L. A., & Gill, D. A. (2020). Cultivating disaster resilience in rural Oklahoma: Community disenfranchisement and relational aspects of social capital. *Journal of Rural Studies*, *73*, 105–113.
- Strijker, D., Bosworth, G., & Bouter, G. (2020). Research methods in rural studies: Qualitative, quantitative and mixed methods. *Journal of Rural Studies*, *78*, 262–270.
- Suradi, S. (2019). Karang taruna, agen perubahan dan pengembangan masyarakat di pandeglang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *8*(3), 241–254.
- Syahra, R. (2003). MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI. In *Jurnal Masyarakat dan Budaya* (Vol. 5, Issue 1).
- Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening Community-Based Tourism in a new resource-based island nation: Why and how? *Tourism Management*, *48*, 386–398.
- Touriki, F. E., Belhadi, A., Kamble, S., & Benkhati, I. (2022). Sustainable, Lean and Resilient SMEs in the Age of COVID 19. In *Sustainable Excellence in Small and Medium Sized Enterprises: Continuous Improvement Approaches that Matter* (pp. 169–189). Springer.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Overview phenomenological research*.
- Utami, A. (2019). *Hubungan Peran Pendamping dengan Partisipasi Pelaku Industri Rumahan dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Palembang Correlation between Community Worker Role and Participation of Home Industry Actors in Women Empowerment Program in Palembang City J. 15*(1).
- Wijaya, S. (2019). Indonesian food culture mapping: a starter contribution to promote Indonesian culinary tourism. *Journal of Ethnic Foods*, *6*(1), 1–10.
- Wirata, G., Dewi, N. D. U., & Widnyani, I. A. P. S. (2020). Social Networks as Social Capital in Facing Local Political Dynamics in the Globalization Era In Bali. *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*, 667–674.
- Wolf, Z. R. (2012). Ethnography: the method. *Nursing Research: A Qualitative Perspective*. Jones and Barlett Publishers, 285–335.
- Zhuang, T., Qian, Q. K., Visscher, H. J., Elsinga, M. G., & Wu, W. (2019). The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing. *Cities*, *92*, 47–58.
- Zugravu-Soilita, N., Kafrouni, R., Bouard, S., & Apithy, L. (2021). Do cultural capital and social capital matter for economic performance? An empirical investigation of tribal agriculture in New Caledonia. *Ecological Economics*, *182*, 106933.